

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur.
- Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agnes M Toar, Fatmah Jatim, Gary Goodpaster, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Baut, Paulus, 1990, *Dilema Arus Pembangunan, Kondisi Hak Asasi Manusia 1986-1987*, YLBHI : Jakarta.
- Changaroath, Anil, 2019, *Resolving Disputes A Guide to The Options for Appropriate Dispute Resolution (ADR)*, Marshall Cavendish Editions : Singapore.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Endang Suhendar & Winarni, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, Akatiga : Bandung.
- Endang Suhendar, 1994, *Pemetaan Pola-pola Sengketa Tanah di Jawa Barat*, Akatiga : Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1991, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, cetakan kesepuluh, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Ed. Rev., cet. 12, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1978, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaruan hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Ismail, Nurhasan, 2018, *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press : Malang.
- J.Folberg dan A.Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*, Cambridge University Press.
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang : Malang.
- LBH Bandung, 2017, *Hak Asasi Manusia, bab yang hilang dalam cerita pembangunan*, LBH Bandung: Bandung.
- Marzuki, Kunarto, 2015, *Perlawanan Petani Cikaso Reportase Singkat Konflik Agraria di Cikaso Ciamis Jawa Barat*, Yogyakarta : Sangkal Indiebook.
- Moore, Christopher W dan Woodrow, Peter J, 2010, *Handbook of Global and Multicultural Negotiation*, Jossey-Bass : San Fransisco.
- M.S. Firdaus, MS, A Nuraini, K.N. Dewi, R Aswidah, S Amisani, E Dahana, J.N. Widiarti, 2013, *Pembangunan berbasis Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM RI, DKI Jakarta.
- Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

- Nurnaningsih, Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta : Grafindo Persada.
- Rachmadi, Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Roy J Lewicki, Bruce Barry, David M Saunders, 2012, *Negosiasi (Negotiation)*, diterjemahkan oleh M. Yusuf Hamdan, Salemba Humanika : Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni: Bandung.
- Salindeho, John. 1988. *Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soepomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- S.W. Sumardjono, Maria, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Kompas : Jakarta.
- S.W. Sumardjono, Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- S.W. Sumardjono, Maria, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- S.W. Sumardjono, Maria. 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutedi, Adrian, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta Berbagai Permasalahannya*, BP. Cipta Jaya : Jakarta.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- Supriyadi, Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Raja Grafindo Persada : Depok.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta.
- Thomas Malthus dalam G Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, A Setiady, 1991, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Toar, M Agnes, Fatmah Jatim, Gary Goodpaster, H Aminuddin Salle, HMG Ohorella, dkk, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Umar said Sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika : Malang.
- Veeger, 1993, *Realitas Sosial*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Wahid, Muchtar, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah Suatu Analisis dengan pendekatan Terpadu secara Normatif dan Sosiologis*, Republika : Jakarta.
- Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jurnal / Makalah

- Afrik Yunari, 2016, Jurnal : *Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Inovatif: Volume 2 No. 1 Februari 2016.
- Benny Djaja, 2020, Jurnal : *Amicable Settlement Through Mediation in Land Disputes*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research.
- Dw Ngk Gd Agung Basudewa Krisna I Made Subawa, *Dualisme Kompetensi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Edison R, 2006, *Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Daerah (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Hankam-Cikunir)*, Tesis Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program PascaSarjana Universitas Indonesia.
- H. Aridi, dan M. Natsir Asnawi, *Batasan Kewenangan Pengadilan Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah*, Jurnal Publikasi Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2002, *Sengketa-sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Makalah Seminar : Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah, Jakarta.
- Hirsanuddin, 1996, Tesis : *Pola Penguasaan Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Pulau Lombok Studi Kasus Pembebasan Tanah Kawasan Pariwisata Rowok Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah*, Depok : Universitas Indonesia.
- H. Aridi, dan M. Natsir Asnawi, *Batasan Kewenangan Pengadilan Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah*, Jurnal Publikasi Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Irin Siam Musnita, 2008, Tesis: *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ismail, Nurhasan. 2012. *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional vol. 1, No. 1, April 2012.
- Luthfi Nasution, 2021, *Catatan Ringkas tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah, Pokok-pokok Pikiran dalam Sarasehan oleh Badan Pertanahan Nasional 24 Oktober 2021*.
- Marzuki, Kunarto, 2015, *Perlawanan Petani Cikaso Reportase Singkat Konflik Agraria di Cikaso*, Ciamis Jawa Barat, Sangkal Indiebook: Yogyakarta.

- Marten, Bunga, 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
- Muhamad Luthfi, 2019, Skripsi: "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Perkara Nomor 003/St.Banhum/LKBH-IAIN.S/03/2018 di LKBHI IAIN Salatiga) Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Hukum Islam*", IAIN : Salatiga.
- Soehandjono, 1991, *Upaya Penyelesaian Masalah Pertanahan untuk Kepentingan Berbagai Sektor Pembangunan yang Sekaligus Meningkatkan Kualitas dan Masyarakat Indonesia*, Kerta Karya Perorangan, Markas Besar ABRI Lembaga Pertanahan Nasional.
- Soni Harsono, 1996, *Konflik Pertanahan dan Upaya-Upaya Penyelesaiannya*, Studium Generale Disampaikan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 17 Desember 1996.
- Sulastriyono, 1997, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, Tesis S 2 Program Pasca Sarjana UI, Jakarta.
- Wahanisa, Rofi, 2019, *Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda yang Ada Diatasnya : Antara Ada dan Tiada*, Jurnal RechtsVinding, Volume 8 Nomor 3 Desember 2019.
- Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, dalam Soediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Gramedia, Jakarta.

Internet

- <https://www.adrodrinternational.com/the-positive-impact-of-mediation-in-property-disputes>.
- John R Allison, *Five Ways to Keep Disputes Out of Court*, <https://hbr.org/1990/01/five-ways-to-keep-disputes-out-of-court>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum

Peraturan Perundang- undangan

- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

- 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan- badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pengadaan Tanah.
- Peraturan Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidssdaad*).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 541/Pdt.G/2018/PN.TNG tanggal 30 Januari 2019 perihal gugatan melawan hukum Pemerintah Kota Tangerang oleh Penggugat ahli waris Bana.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 43/Pdt/2019/PT.Btn tanggal 9 Mei 2019 perkara perihal upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 541/Pdt.G/2018/PN.TNG tanggal 30 Januari 2019 perihal gugatan melawan hukum Pemerintah Kota Tangerang oleh Penggugat ahli waris Bana.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 800 K/Pdt/2020 tanggal 28 April 2020 perihal permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 541/Pdt.G/2018/PN.TNG tanggal 30 Januari 2019